

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	3
D. Manfaat penelitian.....	3-4
E. Metode penelitian	
1. Tipe Penelitian.....	4
2. Pendekatan.....	5
3. Sumber Bahan Hukum.....	5-6
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
5. Analisa Bahan Hukum.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN TEORI PRAPERADILAN

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana.....	8
2. Tujuan Hukum Pidana.....	21

B. Pembagian Tindak Pidana Korupsi

1. Berdasarkan Substansi Obyek Tindak Pidana Korupsi...	23
2. Berdasarkan Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	25

C. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji Yang

Berhubungan Dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11)	26-28
--	-------

D. Penemuan Hukum Oleh Hakim Pidana.....

28

E. Praperadilan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pra Peradilan.....	30
2. Fungsi dan Kewenangan Pra Peradilan.....	34
3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan.....	36
4. Pejabat Yang Dapat Diajukan Praperadilan.....	39
5. Acara Pemeriksaan Praperadilan.....	40
6. Isi Putusan Praperadilan.....	43
7. Pembebanan Biaya Perkara.....	46
8. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan.....	47
9. Dalam Rangka Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).....	48

F. Hasil atau Kesimpulan Penelitian Lain.....

50

G. Teori-Teori Tentang Hakim Sebagai Corong Undang-Undang..

67

BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA

A. Prinsip Kebebasan dan Kemerdekaan Hakim dalam Sumber Hukum Internasional, Nasional dan Latar Belakang Sejarah- di Indonesia.....	71
B. Kemerdekaan Hakim dan Hakikat Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Berkeadilan dan Bermartabat.....	73
C. Pemikiran Diseputar Hukum Progresif.....	87
D. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.....	92
E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.....	93

BAB IV STUDI KASUS DAN ANALISA

A. Kasus Posisi.....	95
B. Analisa Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Diluar Ketentuan KUHAP	97
C. Analisa Putusan Praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi Terhadap Undang-Undang Kehakiman dan/atau Hukum Positif di Indonesia.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN